

DUKUNGAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN PADA KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH TERTENTU DI INDONESIA

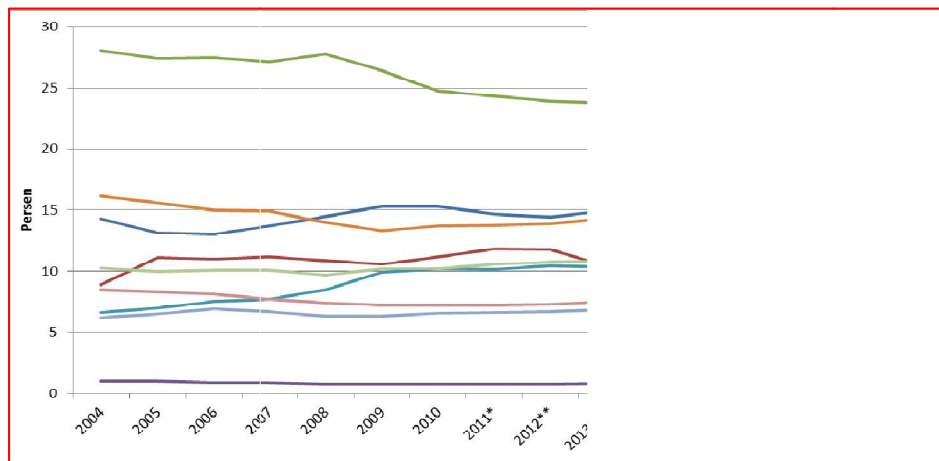
Oleh
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Indonesia memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, terdiri dari pulau-pulau besar dan kepulauan yang dihubungkan dengan wilayah perairan diantaranya. Kondisi alam yang sedemikian rupa ini menjadikan Indonesia memiliki potensi keunggulan yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran rakyat sekaligus juga hambatan yang besar dalam mencapai kemakmuran bersama tersebut.

Potensi keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah dalam perspektif keanekaragaman sumber daya alam, budaya dan jumlah manusia. Sementara itu hambatan terbesar dari kondisi alam yang kita miliki adalah konektifitas antar pulau dan kepulauan yang harus melalui wilayah perairan karena membutuhkan moda transportasi yang lebih mahal dibandingkan dengan negara lain yang seluruh wilayahnya adalah bentangan daratan. Kondisi ini mengakibatkan tidak lancarnya arus sumber daya dari satu tempat ke tempat lain demi mencapai efisiensi produksi.

Gambar 1

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2004-2013



Sumber : BPS, Diolah

Catatan :

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

***Angka sangat sangat sementara (sampai triwulan II 2013)

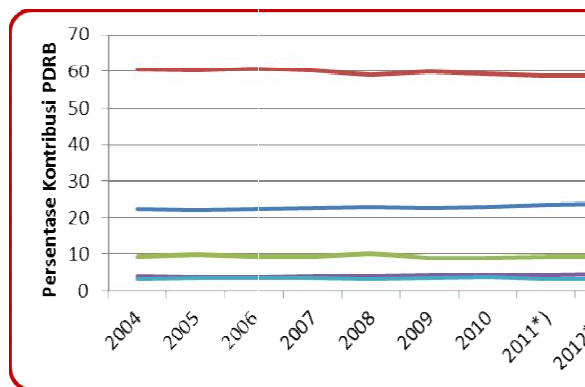
Strategi pembangunan nasional telah berhasil mengubah struktur ekonomi yang semula bertumpu pada sektor pertanian (pada masa-masa awal kemerdekaan dan pemerintahan bangsa Indonesia) menjadi sektor industri pengolahan. Walaupun begitu terlihat Industri pengolahan mengalami penurunan kontribusi persentase PDB dari 28,10% (tahun 2004) menjadi 23,77% (tahun 2013), penurunan ini terjadi di kedua sektor pengolahan baik di

sektor migas maupun non migas. Kenaikan kontribusi persentase PDB justru naik dari dua sektor yang bertumpu pada kekayaan alam yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (naik dari 14,3% pada tahun 2004 menjadi 14,98% pada tahun 2013) dan sektor pertambangan dan penggalian (naik dari 8,9% pada tahun 2004 menjadi 10,4% pada tahun 2013). Kondisi ini tidak dapat dipertahankan (dibiarkan) mengingat sektor primer merupakan sektor yang memiliki nilai tambah yang tidak terlalu besar yang memiliki multiplier efek yang besar dalam penciptaan lapangan-lapangan kerja baru, dan untuk sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber pertumbuhan yang tidak dapat diperbaharui (pada suatu saat akan habis tereksplorasi) yang pemanfaatannya harus tepat sesuai kebutuhan.

Permasalahan besar juga terjadi dalam distribusi perhitungan kontribusi produk domestik regional bruto pada produk domestik bruto nasional, terlihat bahwa sumber kontribusi tertinggi berasal dari Pulau Jawa (urutan pertama) dan Sumatera (pada urutan kedua) dan semakin mengarah ke timur Indonesia kontribusinya semakin kecil. Perbedaan distribusi kontribusi PDRB menunjukkan ketimpangan perekonomian yang seharusnya tidak terjadi mengingat bahwa potensi keunggulan daerah dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebar merata diseluruh kepulauan Indonesia.

Gambar 2

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2004-2012 (dalam Persen)

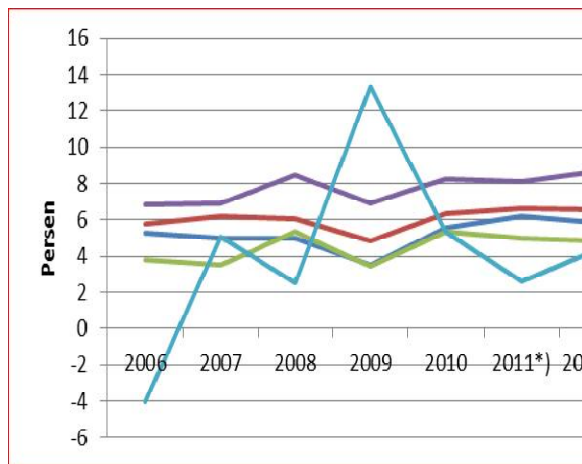


Sumber : BPS, diolah

Pada gambar 2 di atas pada periode waktu tahun 2004 sampai dengan 2014, terlihat bahwa kontribusi pulau Jawa dan Bali cenderung menurun dengan lambat pada angka 60%(tahun 2004) menjadi 58% (tahun 2012) dan menunjukkan dominasinya dibanding daerah lainnya. Pada urutan kedua pulau Sumatera cenderung mengalami kenaikan kontribusi dari 22,41% (tahun 2004) menjadi 23,77% (tahun 2012).

Secara alamiah dominasi kontribusi PDRB memang cenderung menuju satu titik yang sama, hal ini diperlihatkan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi justru berada wilayah timur Indonesia yaitu di pulau Sulawesi, Papua dan Maluku yang disebabkan ditemukannya sumber-sumber tambang mineral dan pemanfaatan sumber daya alam lain seperti penangkapan ikan.

Gambar 3
Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000



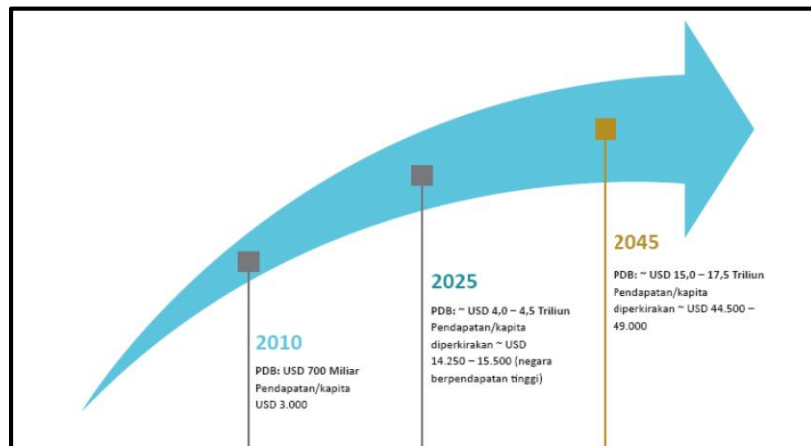
Sumber : BPS, diolah

Pertumbuhan tertinggi terjadi di pulau Sulawesi dengan angka pertumbuhan antara 6,85% (2006) sampai dengan 8,67%(2012), dan ketika terjadi krisis keuangan global pada tahun 2009 pertumbuhan masih lebih tinggi dari tahun 2006 yaitu pertumbuhan di angka 6,92%. Justru pada tahun 2009 pertumbuhan tertinggi di Papua, Nusa Tenggara dan Maluku yaitu sebesar 13,32% (kontribusi pertumbuhan terbesar berada di propinsi Papua Barat, Papua dan Nusa Tenggara Barat).

Walaupun secara alamiah pertumbuhan beberapa wilayah di timur Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan di pulau Jawa dan Sumatera, namun penyesuaian ketimpangan tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu pemerintah mempersiapkan perencanaan berupa program MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025) yang bertujuan untuk mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025 dengan bertekad mempercepat transformasi ekonomi. MP3EI mengedepankan pendekatan “*not business as usual*”, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ada.

Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 Triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 3,0 persen pada 2025.

Gambar 4
Aspirasi pencapaian PDB Indonesia



Sumber : MP3EI

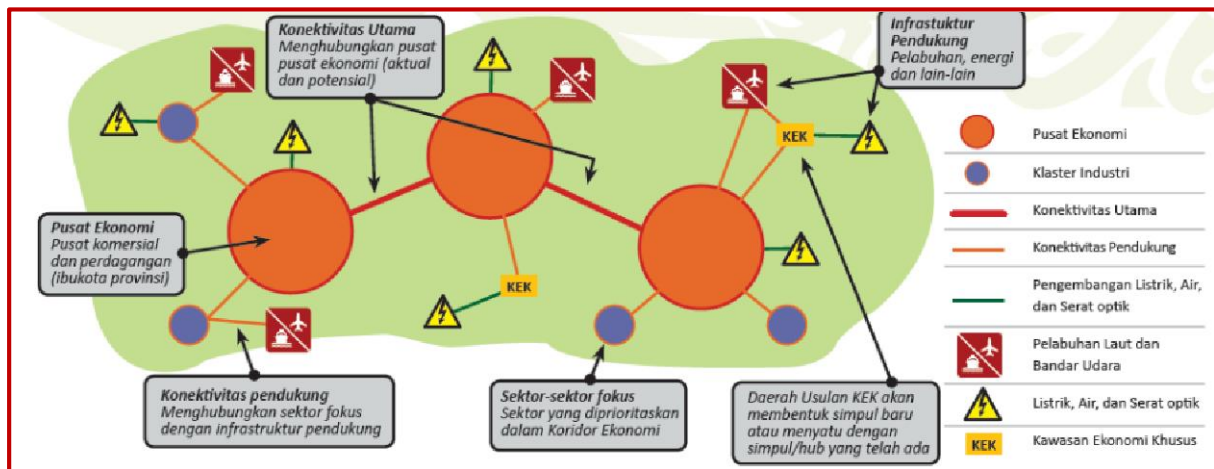
Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu:

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.
3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju *innovation-driven economy*.

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia.

Gambar 5.
Pembangunan koridor ekonomi Indonesia



Sumber : MP3EI

Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi dibutuhkan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi baru, diluar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang telah ada. Pemerintah dapat memberikan perlakuan khusus untuk mendukung pembangunan pusat-pusat tersebut, khususnya yang berlokasi di luar Jawa, terutama kepada dunia usaha yang bersedia membiayai pembangunan sarana pendukung dan infrastruktur. Tujuan pemberian perlakuan khusus tersebut adalah agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam mendukung rencana pengembangan daerah dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut di atas, beberapa kebijakan pendapatan negara yang bersifat khusus merelaksasi ketentuan perpajakan yang berlaku telah ditetapkan sebagai berikut dibawah ini.

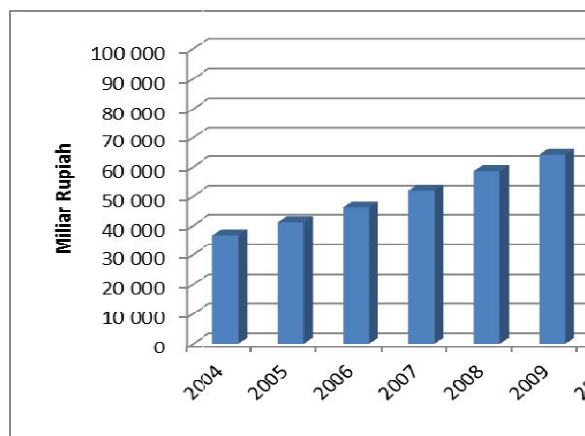
Tabel 1
Kebijakan Pengembangan Kawasan

Jenis Kawasan	Ketentuan	Keterangan
Kawasan Berikat	PP Nomor 33 Tahun 1996 jo. PP Nomor 32 Tahun 2009	Kawasan dengan batas tertentu untuk pengolahan barang asal impor dan DPIL yang hasilnya untuk tujuan ekspor
Kawasan Industri	Keppres Noo. 41/1996 jo. PP no.24 tahun 2009	Kawasan pemusatan kegiatan industri (KI) yang dikelola oleh perusahaan KI
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	PP No. 26/2007 Keppres Pembentukan Kapet	Kawasan yang memiliki potensi cepat tumbuh sektor unggulan dan potensi pengembalian investasi besar
FTZ atau KPBPB	UU no. 37/2000, PP no 46,47 dan 48 tahun 2008	Kawasan dengan batas tertentu yang terpisah dari daerah pabean sehingga terbebas dari bea masuk PPN, PPnBM dan Cukai
Kawasan Ekonomi Khusus	UU. No 39/2009, Perpres No. 33/2010, Kepres No. 8/2010	Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu

Secara garis besar setiap kebijakan perpajakan pada kawasan tertentu di atas memberikan perlakuan khusus yang merelaksasi ketentuan perpajakan berupa pemberian *tax allowance* pada pajak penghasilan, pembebasan/penundaan bea masuk dan pembebasan/tidak dipungut PPN yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan industri-industri baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kecuali untuk kawasan perdagangan bebas dan kawasan berikat, fasilitas perpajakan belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor mendasar yang belum tersedia seperti infrastruktur dan konektivitas yang belum baik dengan pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada.

Pemanfaatan kebijakan perpajakan yang sangat *intense* “dilaksanakan” terjadi pada kawasan perdagangan bebas Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Berdasarkan data pembentukan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai dari Rp36,73 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp91,72 triliun pada tahun 2012.

Gambar 6
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau,
Atas Dasar Harga Berlaku, 2004-2012



Sumber : BPS diolah

Catatan :

*angka sementara

** angka sangat sementara

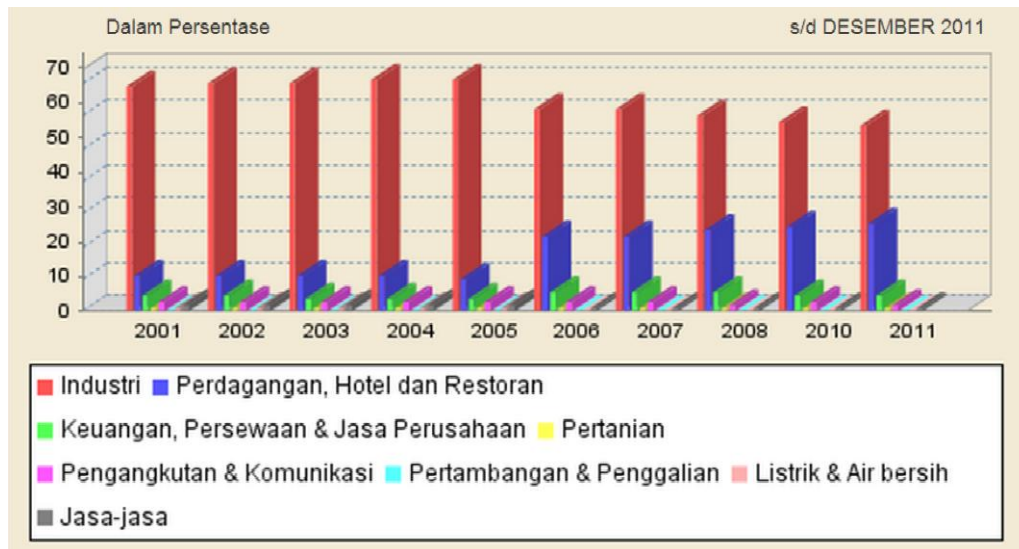
Peningkatan produk domestik regional bruto ini disumbang oleh 7 kabupaten/kota yang terdiri dari Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Batam, Tanjung Pinang dan Anambas. Berdasarkan data distribusi PDRB menurut Kabupaten/Kota terlihat bahwa Batam semakin mendominasi kontribusi perekonomian dengan angka sebesar 66,47% pada tahun 2007 menjadi 68,29% pada tahun 2011. Hal ini sangat didorong oleh perubahan status pulau Batam menjadi kawasan perdagangan bebas.

Pembentukan kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pembangunan ekonomi wilayah melalui peningkatan penanaman modal, untuk menarik potensi pasar internasional, sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Dibanding dengan sektor-sektor lain, peningkatan penanaman modal terutama pada sektor industri pengolahan diharapkan mampu meningkatkan penciptaan nilai tambah terbesar sebagai dampak pengganda yang akan mendorong pertumbuhan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan.

Namun berdasarkan data pada gambar 7, perubahan struktur perekonomian menunjukkan bahwa dominasi sektor industri pengolahan justru mengalami pelemahan sejak kebijakan kawasan perdagangan bebas diberlakukan. Sektor industri pengolahan mengalami penurunan kontribusi distribusi bila dibandingkan dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Gambar 7

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, 2001-2011



Sumber : BP Batam

Tentunya perubahan struktur perekonomian di atas tidak hanya disebabkan oleh kebijakan perpajakan, tapi faktor-faktor lain turut mempengaruhi seperti kebijakan-kebijakan penyediaan dan permasalahan pembiayaan infrastruktur pelabuhan dan kawasan industri, kinerja kewenangan manajemen kawasan, hal-hal terkait penyediaan faktor produksi terutama sumber daya manusia (ketentuan perburuhan dan pengupahan).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kawasan akan cenderung merubah struktur ekonomi kawasan yang perubahannya tersebut diharapkan mengarah pada tatanan ekonomi ideal yang berkesinambungan. Perencanaan kebijakan kawasan harus memetakan sumber daya dan penetapan target pembangunan yang setelah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi dan koreksi kebijakan kawasan apabila arah pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan.